

PROFESIONALISME PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT  
DALAM MENGELOLA ZAKAT PRODUKTIF  
(STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT PROPINSI RIAU)

# SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam  
Pada Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi



DISUSUN OLEH:

ZALMI DZIRRUSYDI

NIM. 10645004278

JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2010

**ABSTRAKSI**  
**PROFESIONALISME PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT**  
**DALAM MENGELOLA ZAKAT PRODUKTIF**

**oleh: Zalmi Dzirrusydi**

Zakat merupakan ibadah amailiah yang harus dilaksanakan oleh semua masyarakat muslim yang sudah memenuhi syarat, dimana yang bertugas untuk mengumpulkan zakat adalah amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah maupun masyarakat. Tetapi pada sekarang ini zakat tidak berjalan sebagaimana fungsinya yaitu mengentaskan kemiskinan bagi umat muslim, jadi permasalahan yang terjadi adalah bagaimana tugas amil dalam menyelenggarakan zakat, apakah sudah profesional atau belum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana profesionalisme pengurus badan amil zakat dalam mengelola zakat produktif dan Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat profesionalisme pengurus badan amil zakat. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Badan Amil Zakat Provinsi Riau yang terletak di Mesjid Agung An-nur, subjek dari penelitian ini adalah pengurus badan amil zakat, dan yang menjadi objek penelitian ini adalah profesionalisme pengurus badan amil zakat dalam mengelola zakat produktif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 27 orang dan yang menjadi sampel 5 orang dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yaitu analisis data diskriptif kualitatif atau pemaparan dan menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat data yang telah diperoleh untuk memperoleh kesimpulan, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan kalimat-kalimat tidak dengan bentuk angka.

Hasil analisis yang telah penulis lakukan menunjukkan bahwa profesionalisme pengurus badan amil zakat provinsi Riau sudah cukup profesional dalam mengelola zakat produktif, pengurus badan amil zakat menerapkan ilmu yang dimilikinya, memiliki sikap yang positif, bekerja sama, mengetahui profesinya, bekerja keras, menguasai dengan baik dasar-dasar pekerjaannya, mampu membedakan masalah pribadi dengan kelompok, memiliki tanggung jawab, dan mempunyai kode etik yang harus ditaati, serta memiliki pengalaman yang cukup. Kemudian yang menjadi faktor pendukung profesionalisme pengurus badan amil zakat adalah adanya bantuan dari pemerintah, adanya undang-undang yang mengatur zakat, memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman, lokasi yang strategis, mempunyai infra setruktur yang memadai, dan memiliki media. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat profesionalisme pengurus badan amil zakat adalah belum maksimalnya bantuan pemerintah, perekrutan yang kurang maksimal, kurangnya dana, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya bantuan dari segala pihak, dan pembentukan pengurus yang tidak maksimal.

## DAFTAR ISI

ABSTRAKSI .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Alasan Pemilihan Judul .....	6
1.3. Penegasan Istilah .....	7
1.4. Permasalahan .....	8
1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
1.6. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional.....	9
1.7 Metode Penelitian.....	29
1.8 Sistematis Penulisan .....	31
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
2.1. Sejarah Badan Amil Zakat .....	33
2.2. Dasar Hukum Badan Amil Zakat Provinsi Riau .....	34
2.3. Visi dan Misi .....	34
2.4 Susunan Pengurus.....	35
2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Amil Zakat.....	37
2.6 Program Unggulan Badan Amil Zakat.....	41

**BAB III    DESKRIPSI TENTANG PROFESIONALISME PENGURUS BADAN AMIL  
              ZAKAT DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA**

3.1	Profesionalisme Pengurus Badan Amil Zakat.....	43
3.2	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya.....	54

**BAB IV    ANALISA TENTANG PROFESIONALISME PENGURUS BAZ DAN FAKTOR  
              YANG MEMPENGARUHINYA**

4.1	Profesionalisme Pengurus Badan Amil Zakat.....	55
4.2	Faktor yang Mempengaruhinya.....	63

**BAB V    PENUTUP**

5.1	Kesimpulan .....	65
5.2	Saran-Saran .....	67

DAFTAR KEPUSTAKAAN .....	68
--------------------------	----

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk sosial merupakan salah satu indikator mengapa manusia saling membutuhkan antara satu sama lainnya. Hal ini tampak dalam pergaulan sehari-hari baik di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan lain. Akibat dari pergaulan tersebut dalam masyarakat akan terjadilah interaksi sosial di mana antara individu yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan, salah satu contoh yang dapat dilihat sekarang ini adalah zakat. Menurut A.M Saefuddin dalam Daud Ali (1998 :9-17) pada sistem ekonomi Islam terdapat lima nilai instrumental yang strategis dan mempengaruhi tingkah laku ekonomi seorang muslim, masyarakat dan pembangunan ekonomi pada umumnya. Lima nilai instrumental itu adalah zakat, pelarangan riba, kerja sama ekonomi, jaminan sosial dan peranan negara.

Muhammad Syafi'i Antonio (1999 : 59) mengatakan bahwa semua sumber asli kekayaan merupakan karunia Allah kepada seluruh umat manusia. Kekayaan yang dihasilkan dari penggunaan keahlian dan kerja manusia pada sumber daya telah disediakan Tuhan sebagai sumber kehidupan dan kesenangannya dan manusia berhak atasnya, sejauh yang diakui oleh agama Islam. Kekayaan yang dihasilkan ada tiga pihak yang berhak atasnya yaitu pekerja yang terdidik maupun yang tidak terdidik, pemilik modal, dan masyarakat dalam kekayaan yang dihasilkan disebut zakat. Sesudah kekayaan ini disisihkan untuk kesejahteraan

masyarakat, sisanya yang telah disucikan boleh dibagikan kepada sisa kelompok yang punya hak atasnya.

Apabila seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya, juga telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanyapun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki dan iri hati, terhadap orang yang mempunyai harta. Dilihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat, berarti hartanya berkurang. Tetapi bila dilihat dari sudut pandang Islam, pahala bertambah, juga harta itu berkembang karena mendapat ridho dari Allah SWT dan berkat panjatan doa dari fakir miskin, anak-anak yatim dan para mustahik lainnya yang merasa disantuni dari hasil zakat. Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh (Hasan Ali, 1995 : 2).

Hasan Ali (1995 : 4) juga mengatakan bahwa kesadaran berzakat, perlu ditumbuhkan dari dalam diri setiap pribadi, tidak berzakat karena terpaksa atau dipaksa, apalagi karena malu pada masyarakat sekitar. Kalau sudah tumbuh kesadaran dari dalam diri masing-masing, maka berapapun harta yang diperoleh akan dikeluarkan hak orang lain yang ada dalam harta itu, bisa berupa zakat sekiranya sudah memenuhi syarat. Dengan demikian harta yang dimiliki sudah benar-benar bersih, baik harta yang dimiliki banyak maupun sedikit. Sesudah perintah zakat tersebut dipahami dengan baik dan didorong oleh rasa kesadaran bermasyarakat dan sebagai pernyataan syukur kepada Allah SWT, maka apapun

jenis zakat yang akan dikeluarkan itu, tidak akan ada yang merasa keberatan, malahan menambah ketentraman jiwa.

Peran zakat yang sebenarnya belum terwujud pada kehidupan bermasyarakat, baik dari kegiatan pendayagunaan harta zakat maupun pengumpulan harta zakat dari tingkatan-tingkatan masyarakat dan membagikannya kepada kelompok yang berhak. Sebenarnya dari sini masyarakat dapat bergerak dengan sirkulasi keuangan tersebut, baik segi keuangan maupun kemanusiaan untuk mencapai kemajuan yang sebenarnya. Hal itu dapat dicapai hanya dengan membayar zakat (Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, 2006 : 4).

Didin Hafidhuiddin (2002 : 9-10) menceritakan bahwa dalam sejarah Islam, khalifah abu bakar Ash-Shidiq sangat tegas memerangi orang-orang shalat tetapi tidak mengeluarkan zakat. Ketegasan ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal itu dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lainnya. Tentang ancaman bagi yang menentang adanya zakat, terdapat dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 34. Zakat merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Hal ini menunjukkan pentingnya zakat setelah shalat yang merupakan sarana komunikasi utama antara manusia dengan manusia lain dalam kehidupan yang harmonis, Artinya manusia hidup memerlukan pertolongan dan bantuan orang lain.

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60 dan 103:



٠١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٩٣٠٣١٣٢٣٣٣٤٣٥٣٦٣٧٣٨٣٩٤٠٤١٤٢٤٣٤٤٤٥٤٦٤٧٤٨٤٩٥٠٥١٥٢٥٣٥٤٥٥٥٦٥٧٥٨٥٩٦٠٦١٦٢٦٣٦٤٦٥٦٦٦٦٧٦٨٦٩٧٠٧١٧٢٧٣٧٤٧٥٧٦٧٧٧٧٨٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨٨٩٩٠٩١٩٢٩٣٩٤٩٥٩٦٩٧٩٨٩٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٩٣٠٣١٣٢٣٣٣٤٣٥٣٦٣٧٣٨٣٩٤٠٤١٤٢٤٣٤٤٤٥٤٦٤٧٤٨٤٩٥٠٥١٥٢٥٣٥٤٥٥٥٦٥٧٥٨٥٩٦٠٦١٦٢٦٣٦٤٦٥٦٦٦٦٧٦٨٦٩٧٠٧١٧٢٧٣٧٤٧٥٧٦٧٧٧٧٨٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨٨٩٩٠٩١٩٢٩٣٩٤٩٥٩٦٩٧٩٨٩٩

*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Qs At-Taubah 60)*

Dalam surat At-Taubah ayat 103

٠١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٩٣٠٣١٣٢٣٣٣٤٣٥٣٦٣٧٣٨٣٩٤٠٤١٤٢٤٣٤٤٤٥٤٦٤٧٤٨٤٩٥٠٥١٥٢٥٣٥٤٥٥٥٦٥٧٥٨٥٩٦٠٦١٦٢٦٣٦٤٦٥٦٦٦٦٧٦٨٦٩٧٠٧١٧٢٧٣٧٤٧٥٧٦٧٧٧٧٨٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨٨٩٩٠٩١٩٢٩٣٩٤٩٥٩٦٩٧٩٨٩٩

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui (Qs At-Taubah 103)*

Pada fenomena saat ini, otoritas negara sudah diwakili oleh suatu bentuk lembaga *intermediary* (amil), dimana berdasarkan UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, bahwa pengelola zakat dilakukan oleh Badan amil zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Berdasarkan keputusan Mentri agama RI tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat disebutkan pada pasal 2 mengenai susunan oragnisasi poin 3 badan amil zakat mempunyai susunan hierarki mulai dari Badan Amil Zakat nasional yang berkedudukan di Ibu kota negara, Badan Amil Zakat Propinsi



berkedudukan di Ibu Kota provinsi, Badan Amil Zakat daerah berkedudukan di Ibu Kota kabupaten, dan terakhir Badan Amil Zakat kecamatan yang berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan (Arief Mufarini, 2008 : 138).

Sistem pengelolaan zakat produktif yang baik apabila para pengurus amil zakat mampu untuk menerapkan manajemen yang baik dalam pelaksanaannya, sebagaimana dijelaskan dalam Qodri Azizy (2004 : 146-148) bahwa pendayagunaan harta zakat hendaknya menghindari sebisa mungkin bersifat konsumtif, seharusnya zakat dikelola agar lebih berdayaguna yaitu bersifat produktif, dengan membuat suatu perencanaan yang benar-benar bisa bermanfaat. Misalnya dengan:

- a. Program memberi bekal ketrampilan kerja bagi orang miskin.
- b. Memberikan training dalam menjalankan suatu usaha kecil, sehingga mustahik bisa menjadi interprenuer kecil-kecilan.
- c. Memberikan beasiswa bagi anak-anak para mustahik, sehingga mereka bisa mandiri dan berkerja dengan kemampuannya.
- d. Membuat suatu kerja sama antara Badan Amil Zakat dengan perusahaan tertentu yang memperkerjakan mustahik yang sudah mendapatkan training.

Menurut penjelasan dari Suyitno (2005 : 144-145) pengelolaan zakat yang profesional apabila mempunyai tiga kriteria yaitu:

- a. Amanah, Sifat amanah merupakan kunci jaminan mutu dari kepercayaan masyarakat. Tanpa adanya sifat ini, kehancuran perekonomian akan segera nampak. Sikap tidak amanah menunjukkan rendahnya moral, apalagi pengelolaan dana umat sangat membutuhkan sikap kepercayaan penuh.

- b. Efisiensi dan efektivitas manajemen memerlukan sikap profesional dari semua pengurus Badan Amil Zakat
- c. Sistem kontrol yang baik akan terjadi jika jiwa transparansi dalam pengelolaan dana umat dapat dilaksanakan.

Badan amil zakat adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dimana didalamnya terdapat unsur masyarakat dan pemerintah, yang bertugas untuk mengelola, mengumpulkan, dan mendistribusikan zakat. Badan Amil Zakat Provinsi Riau memiliki moto dalam mengelola zakat produktif yaitu amanah, terpercaya dan profesional tetapi dalam pelaksanaannya belum terlaksana dengan maksimal.

Berangkat dari gejala-gejala yang timbul dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dengan mengangkat permasalahan ini ke dalam suatu karya ilmiah dengan judul "Profesionalisme Pengurus Badan Amil Zakat Dalam Mengelola Zakat Produktif"

## **1.2 Alasan Memilih Judul**

- a. Permasalahan ini menarik untuk diteliti karena penulis melihat Badan Amil Zakat Propinsi Riau mengalami kesulitan dalam mengelola zakat produktif, sehingga dengan penelitian ini dapat memberikan solusi kepada Badan Amil Zakat Provinsi Riau.
- b. Dalam Segi waktu, dana, tenaga, sarana dan prasarana lainnya penulis merasa mampu dan sanggup untuk melaksanakannya.
- c. Judul ini sebelumnya belum pernah diteliti pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi khususnya pada Jurusan Manajemen Dakwah.

### **1.3 Penegasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis memberi batasan dan penjelasan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Profesionalisme

Profesionalisme adalah mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Profesional bersangkutan dengan profesi (Tri Rama, 2003: 397).

b. Badan Amil Zakat

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Badan Amil Zakat terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Tugas Badan Amil Zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat termasuk infak dan sedekah Sesuai dengan ketentuan Islam. Keberadaan Badan Amil Zakat merupakan salah satu ketentuan penting yang terdapat dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Keberadaan Badan Amil Zakat dimaksudkan untuk memaksimalkan sistem pengelolaan zakat agar berhasil guna dan berdaya guna, sehingga pelaksanaan zakat dapat dipertanggungjawabkan (Mamlatul Maghfiroh, 2007: 97).

c. Pengelolaan Zakat Produktif

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka yang dimaksud “Pengelolaan Zakat” adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Didin

Hafidhudin, 2002: 8). Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik (Abdurrahman Qadir, 1998 : 46).

#### **1.4 Permasalahan**

##### **1.4.1 Identifikasi Masalah**

- a. Bagaimanakah profesionalisme pengurus badan amil zakat dalam mengelola zakat produktif?
- b. Apa saja faktor yang mendukung profesionalisme pengurus badan amil zakat dalam mengelola zakat produktif?
- c. Apa saja faktor yang menghambat profesionalisme pengurus badan amil zakat dalam mengelola zakat produktif?
- d. Bagaimanakah mengelola zakat produktif yang profesional oleh pengurus badan amil zakat?
- e. Apakah profesionalisme dalam mengelola zakat produktif diperlukan oleh pengurus badan amil zakat?

##### **1.4.2 Batasan Masalah**

Penulis memberikan batasan dalam penelitian ini, Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan judul penelitian profesionalisme pengurus badan amil zakat dalam mengelola zakat produktif.

##### **1.4.3 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah profesionalisme pengurus badan amil zakat dalam mengelola zakat produktif?
- b. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat profesionalisme pengurus badan amil zakat dalam mengelola zakat produktif?

### **1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui profesionalisme pengurus badan amil zakat dalam mengelola zakat produktif.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat profesionalisme pengurus badan amil zakat dalam mengelola zakat produktif.

Adapun Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Badan Amil Zakat dan organisasi lainya yang berkaitan.
- b. Dapat bermanfaat bagi pengetahuan penulis dan pembaca.
- c. Untuk mendapatkan gelar sarjana sosial Islam ( S. Sos I) pada fakultas dakwah dan ilmu komunikasi.

### **1.6 Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional**

#### **1.6.1 Kerangka Teoritis**

- a. Profesionalisme

Profesionalisme adalah mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Profesional bersangkutan dengan profesi. Seorang profesional sejati adalah seorang teknisi yang benar-benar peduli. Profesionalisme sejati

mengisyaratkan suatu kebanggaan pada pekerjaan, komitmen pada kualitas, dedikasi pada kepentingan masyarakat, dan keinginan tulus untuk membantu. Salah satu alasan langkanya profesionalisme sejati adalah cacat proses perekrutan. Profesionalisme sejati berkaitan dengan sikap, dan bahkan dengan watak. Tetapi hanya segelintir melakukan penyaringan yang efektif pada waktu mencari karyawan, entah pada tingkat penerimaan staf yunior ataupun secara sepihak memasukan para pakar yang sudah lebih berpengalaman. Kebanyakan proses pengerahan tenaga berkaitan dengan kualifikasi edukasional dan ketrampilan teknis (David Maister, 1998: 23-26).

Profesi adalah pekerjaan/jabatan yang memerlukan keahlian khusus yang berbeda satu dengan yang lain.

Profesi adalah pekerjaan/jabatan yang memerlukan kemampuan intelektual khusus, yang diperoleh dari kegiatan belajar dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai ketrampilan atau keahlian dalam melayani dan memberikan advis kepada orang lain, dengan memperoleh gaji/upah dalm jumlah tertentu yang memadai.

Profesionalitas dalam suatu pekerjaan/jabatan harus memenuhi tiga faktor sebagai berikut:

1. Menguasai seperangkat keahlian yang dipersiapkan melalui program pendidikan atau pelatihan keahlian sebagai spesialisasi.
2. Memiliki kemampuan untuk memperbaiki/meningkatkan ketrampilan dan keahlian khusus yang dikuasai sesuai perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi dibidangnya, sehingga keahlian atau spesialisasinya selalu terkini.

3. Dihargai dengan penghasilan yang memadai sebagai imbalan profesi berdasarkan keahlian khusus yang dikuasai.

Uraian diatas menunjukan bahwa profesionalisme berkaitan erat dengan kompetensi, dalam arti seorang pekerja yang profesional adalah pekerja yang berkompeten dibidang kerjanya. Seorang profesional di bidangnya memerlukan kompetensi khusus berupa kemampuan intelektual yang tinggi berdasarkan penguasaan pengetahuan yang diperoleh dari lembaga pendidikan dan pelatihan tertentu. Dengan kata lain profesionalitas menggambarkan kompetensi dalam bekerja yang didukung oleh keahlian sehingga dapat melaksanakan pekerjaan secara efektif, efisien, produktif, dan berkualitas.

Selanjutnya dapat dikatakan juga bahwa seorang profesional pada dasarnya merupakan pribadi yang berkarakter dan menguasai komponen kompetensi intelektual dan komitmen yang kuat terhadap karirnya yang didasari oleh kemampuan bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya dan selalu berorientasi pada pemberian pelayanan. (Hadari Nawawi, 2006 : 172-173)

Menjadi seorang profesional tidak berkaitan dengan uang ataupun pemenuhan profesional. Kedua hal itu adalah konsekuensi dedikasi total pada keunggulan dalam melayani klien dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Sebagaimana pendapat Dele Carnegie dalam David Maister (1998: 27-34) “anda akan mendapat kesenangan dan kesuksesan lebih besar dengan membantu orang lain mencapai tujuan mereka dari pada dengan berusaha mencapai tujuan anda sendiri”. Salah satu faktor lain yang menekan keinginan orang-orang untuk bertindak secara profesional adalah lingkungan dimana mereka bekerja dan

bagaimana mereka dikelola. Mendapatkan disiplin dan motivasi untuk berperilaku secara profesional adalah lebih mudah jika setiap orang disekitar anda berbuat sama. Untuk mendorong orang-orang menjadi profesional, anda harus memperlakukan mereka sebagai profesional dan tidak mentolerir apa pun yang kurang dari itu. Keberhasilan profesional tidak hanya menuntut bakat, tetapi menuntut dorongan, inisiatif, komitmen, keterlibatan dan antusiasme.

Suatu kultur profesional berkaitan dengan keahlian, spesialisasi dan pengetahuan teknis. Seseorang menjadi profesional jika telah diakui memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang terkait. Untuk itu diperlukan pendidikan yang memberikan pengetahuan dasar dan prinsip-prinsip suatu profesi sebelum bekerja. Setelah memasuki dunia yang sebenarnya, dengan menjadi profesional, harus selalu memelihara hubungan dengan dunia pendidikan dan organisasi profesional yang dipilih. Dengan demikian akan dapat dipertahankan ketrampilan, nilai-nilai dan standar-standar yang berlaku. Sosialisasi dengan tenaga profesional yang berlainan profesi merupakan suatu keharusan karena ini akan memperluas wawasan untuk membina kerjasama. Ada beberapa ciri dari seorang profesional:

1. Memiliki ketrampilan
2. Memiliki wewenang dalam menjalankan tugas
3. Mempunyai komitmen dan kinerja yang tinggi
4. Mengidentifikasi dengan organisasi profesi
5. Mempertahankan etika kerja
6. Terkait kepada standar yang telah ditetapkan (Wiwoho, 1991: 185).



Dalam enam ciri tersebut, yang paling penting adalah dalam pekerjaan, karena memang sinonim dengan profesionalisme. Namun untuk melengkapi dan paling dibutuhkan oleh para profesional adalah adanya suatu tantangan. Artinya dengan menghadapi tantangan, para profesional akan dapat memakai segala ketrampilan yang dimiliki. Apalagi dengan adanya minat terhadap suatu pekerjaan yang memiliki arti dan dampak kepada masyarakat luas, yang akan menjamin adanya tanggung jawab sosial atau konsekuensi etik (Wiwoho, 1991: 185).

Profesional memiliki arti sikap mental seseorang yang sudah memegang suatu profesi dan sangat lekat dengan profesi itu, serta menguasai segala aspek yang ada didalamnya. Adapun beberapa ciri-ciri pekerja yang profesional antara lain:

1. Memiliki sikap mental positif terhadap pekerjaan.

Artinya memiliki sikap dan sifat jujur, cermat, tepat waktu, rasa tanggung jawab, penuh perhatian, mengutamakan pekerjaan, mengutamakan pelanggan, menaati prosedur dan aturan, menjaga kualitas pekerjaan, dan berbagai perilaku positif yang lain.

2. Kemampuan bekerja sama dengan orang banyak.

Artinya, tidak hanya dapat bekerja sendirian, tetapi juga bersinergi dalam rangka kerja sama dalam tim. Dalam hal ini, sikap individualistis harus dibuang jauh-jauh, dan dengan penuh antusias bekerja bersama pihak lain.

3. Kemauan keras untuk mempelajari profesinya

Artinya, ingin selalu mengembangkan potensi dengan cara belajar dari seniornya dan sumber-sumber yang lain sehingga beberapa tahun kemudian

ada kemajuan pesat dalam pribadinya dan semakin memperkuat nilai profesionalitas yang dimilikinya.

4. Memiliki stamina dan daya kerja yang kuat

Artinya, sanggup berkerja dalam kondisi kerja kuat untuk waktu 8 jam setiap harinya dan penuh kesibukan sehingga diperlukan stamina yang kuat untuk dapat mendukung pekerjaan.

5. Menguasai dengan baik dasar-dasar pekerjaannya

Artinya, kemampuan menguasai teknis yang paling dasar atau paling baku dalam pekerjaan.

6. Memiliki prestasi selalu pada kualitas produksi

Artinya, dalam pikirannya hanya ada tujuan untuk membuat hasil kerjanya menjadi hasil yang prima, utuh, tidak setengah-setengah dan memiliki nilai yang terbaik, karena menyadari bahwa siapa saja akan menilai pribadi dan kompetensinya dari hasil pekerjaan itu. Dengan demikian, pekerja profesional bukan tipe pekerja yang cepat merasa puas dengan apa yang sudah dilakukannya, tetapi selalu ingin berbuat lebih baik lagi, mempersembahkan kerjanya sebaik mungkin dan memiliki budaya malu jika harus menyajikan sesuatu yang buruk.

7. Memiliki pengalaman yang cukup. (Bartono, 2005 : 22-24)

Profesionalisme pada dasarnya tidak *congruent* dengan institusi, jabatan, pangkat, dan sebagainya. Profesionalisme dilihat berdasarkan takaran individual. Seseorang disebut bekerja secara profesional jika pekerjaannya merupakan:

1. Penerapan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi dalam berkerja.

2. Panggilan jiwa, sesuai dengan talent yang dimilikinya.
3. Merupakan sumber nafkah
4. Penerapan asas taat tugas.
5. Kemampuan untuk dapat menarik perbedaan antara masalah pribadi dengan organisasional.
6. Pekerjaan yang dilakukan berdasarkan kesadaran akan tanggung jawab yang tinggi.
7. Pekerjaan yang dilakukan berdasarkan pendirian, sikap, dan perilaku mandiri di satu pihak, dan siap pula berkerja tim dipihak lain.
8. Pekerjaan yang dilakukan berdasarkan kode etik tertentu.
9. Pekerjaan yang dilakukan berdasarkan prinsip *exchange* atau imbalan.(Taliziduhu Ndraha, 2002 : 174-175)

Pekerja yang profesional adalah pekerja yang mampu untuk menciptakan atau membuat kedua belah pihak menjadi senang, bahagia serta bangga. Kesenangan, kebahagiaan dan kebanggaan haruslah diciptakan terhadap kedua belah pihak, baik pihak yang dilayani maupun pihak yang melayani. Apabila kedua belah pihak tersebut dapat merasa senang, bahagia serta bangga maka disitulah letak profesionalisme dari seorang perkeja dalam menjalankan tugasnya. Ketiga unsur tersebut merupakan ciri atau sifat utama dari seorang pekerja yang profesional.(Indriyo Gitosudarmo, 2003 : 348)

b. Badan Amil Zakat (BAZ)

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Badan Amil Zakat terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat.

Tugas Badan Amil Zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat termasuk infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan Islam. Keberadaan Badan Amil Zakat merupakan salah satu ketentuan penting yang terdapat dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Keberadaan Badan Amil Zakat dimaksudkan untuk memaksimalkan sistem pengelolaan zakat agar berhasil guna dan berdaya guna, sehingga pelaksanaan zakat dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama (Mamlatul Maghfiroh, 2007: 97).

Sesuai dengan UU tentang pengelolaan zakat tersebut, Badan Amil Zakat mempunyai kelebihan dibanding dengan panitia zakat yang telah dibentuk secara tradisional. Sebab, dalam panitia zakat yang dibentuk secara tradisional tidak ada aturan yang tegas tentang persyaratan personalia panitia, penerapan administrasi, dan manajemen, mekanisme pengawasan, dan kewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah. Pengurus Badan Amil Zakat harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas yang tinggi. Agar sistem pengelolaan zakat bisa berhasil, paling tidak harus ada ahli syaria'ah didalamnya agar tahu apa dan bagaimana hukum zakat, ada ahli manajemen agar bisa mengatur lembaga dengan profesional, efektif, dan efisien, dan ahli ekonomi kerakyatan dan pendataan lapangan agar tahu persis siapa saja yang termasuk mustahik, ada ahli ekonomi perusahaan dan dunia usaha agar tahu siapa saja yang wajib zakat. Badan Amil Zakat dibentuk di tiap-tiap

tingkat mulai dari tingkat nasional, sampai tingkat kecamatan. Tiap-tiap tingkat mempunyai hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif (Mamlatul Maghfiroh, 2007: 99).

Pada pertengahan tahun kedua setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau menegaskan harta-harta yang wajib dizakati, kadar zakatnya dan batas waktu wajib zakatnya. Untuk meningkatkan usaha dan efisiensi kerja, maka Rasulullah SAW mengadakan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas-tugas lebih mudah dan lancar, antara lain misalnya, pengangkatan amil zakat (Muhammadiyah Ja'far, 1997: 11).

Didalam masa dua tahun sesudah berhijrah, umat islam telah menjadi suatu masyarakat istimewa, yang mempunyai suatu rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, dan suatu tujuan mulia yang hendak dicapai dengan sistem kehidupan tertentu menurut ajaran Islam. Didalam merealisasikan rencana tersebut, Rasulullah mengangkat amil (petugas) untuk mengurus pengumpulan zakat dari orang-orang yang telah memenuhi syarat wajib zakat, dan meyalurkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Pengangkatan amilin ini, merupakan pembentukan suatu lembaga khusus, untuk mengurus peredaran ekonomi masyarakat, agar tidak terjadi penimbunan kekayaan di satu pihak dan kebutuhan yang sangat mendesak di pihak lain (Muhammadiyah Ja'far, 1997: 11).

Para amil yang diangkat oleh Rasulullah SAW itu dapat dibedakan atas dua bagian yaitu:

1. Amil yang berdomisili didalam kota Madinah, statusnya bersifat sementara untuk membantu Rasulullah SAW dalam pengumpulan zakat dan menyalurkannya.
2. Amil yang bertugas diluar kota Madinah. Status mereka adalah sebagai pemerintah daerah yang sekaligus bertugas sebagai amil zakat. Didalam tugasnya sebagai amil, mereka diperbolehkan mengambil bagian dari zakat dan sebagai pejabat mereka diberikan tunjangan tertentu, sesuai dengan tugasnya, agar mereka tenang dan tekun, serta ikhlas melaksanakan tugas-tugas yang telah dipercayakan kepadanya (Muhammadiyah Ja'far, 1997: 12).

Pada masing-masing tingkat Badan Amil Zakat, minimal terdiri dari sejumlah personalia meliputi:

1. Pimpinan Badan Amil Zakat
2. Beberapa petugas pemungut zakat.
3. Beberapa petugas pembagi zakat
4. Beberapa orang staf ahli pendayagunaan zakat
5. Dibantu dengan beberapa orang staf tata usaha (Niphan Abdul Halim, 2001: 90).

Adapun tugas dan kewajiban dari masing-masing personalia dari Badan Amil Zakat tingkat terendah untuk ukuran ideal minimal tersebut antara lain meliputi:

1. Pimpinan Badan Amil Zakat
  - a. Mengendalikan organisasi secara umum

- b. Membuat laporan pertanggung jawaban secara periodik. Laporan ini disampaikan kepada pemerintah dan kepada masyarakat setempat.
- c. Bertindak sebagai organisator, administrator, dan dinamisator bagi organisasinya serta bagi masyarakat di wilayah kerjanya.
- d. Tugas dan kewajiban lainnya yang dianggap perlu (Nipin Abdul Halim, 2001: 91).

## 2. Petugas Pemungut zakat

- a. Membuat data tentang penghasilan masyarakat setempat.
- b. Mendoakan wajib zakat (muzakki)
- c. memberikan peringatan-peringatan kepada wajib zakat yang cenderung ingin membangkang atau mempersulit tugas pemungutan zakat.
- d. Mempertanggung jawabkan hasil pemungutannya kepada Organisasi Amil Zakat.
- e. Tugas-tugas lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan organisasinya (Nipin Abdul Halim, 2001: 92).

## 3. Petugas Pembagi Zakat.

- a. Membuat data para calon penerima zakat
- b. Membagi-bagikan harta zakat yang ada kepada para mustahik dalam bentuk pemberian yang paling dibutuhkan oleh masing-masing mustahik dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya.
- c. Memberikan bimbingan ekonomis kepada para mustahik
- d. Mengawasi kemajuan dan perkembangan usaha para mustahik.

- e. Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada organisasi dan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan organisasi (Nipah Abdul Halim, 2001: 94).

#### 4. Staf Ahli Pendayagunaan Zakat

- a. Memberikan saran dan pendapat kepada seluruh personalia Badan amil zakat, agar masing-masingnya bisa lebih optimal dalam mengusahakan keberhasilan misi zakat diwilayah kerja organisasi tersebut.
- b. Memberikan konsep yang tepat bagi petugas pemungut zakat, agar zakat diwilayah kerjanya dapat terpungut dengan tuntas, tepat waktu, dan tepat perhitungan.
- c. memberikan konsep yang tepat bagi petugas pembagi zakat, agar zakat dapat terbagikan secara tepat sasaran dan diberdayagunakan secara maksimal.
- d. Merumuskan pengembangan ekonomi umat sesuai dengan sumber daya alam setempat dengan mengoptimalkan sumber daya manusianya.
- e. Bertindak sebagai biro konsultan, jika tidak tersedia job tersendiri (Nipah Abdul Halim, 2001: 95).

#### 5. Staf Tata Usaha

Tugas pokok dari staf ini ialah mengadministrasikan segala hal yang berkaitan dengan seluruh pekerjaan Organisasi Amil Zakat yang bersangkutan (Nipah Abdul Halim, 2001: 96).

Berdasarkan Penjelasan diatas dapat penulis artikan Profesionalisme Badan Amil zakat adalah petugas amil zakat yang mempunyai kemampuan dan



pengetahuan mengenai bagaimana pelaksanaan dan pengelolaan zakat dengan baik, sehingga zakat bisa berjalan dengan semestinya dan mampu untuk mengatasi kesulitan ekonomi umat muslim, dan zakat bisa berperan penting dalam perkembangan perekonomian masyarakat muslim.

c. Pengelolaan Zakat Produktif

Zakat adalah ibadah amaliyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam. Di dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang beririsan dengan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam bentuk kata (Daud Ali, 1998 : 9).

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka yang dimaksud "Pengelolaan Zakat" adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Didin Hafidhudin, 2002: 8).

Melakukan pengelolaan zakat sebagaimana dijelaskan dalam maksud definisi pengelolaan zakat diatas. Diawali dengan kegiatan perencanaan, dimana dapat meliputi perencanaan program beserta budgetingnya serta pengumpulan (*collecting*) data muzakki dan mustahiq, kemudian pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi (*Dewan pertimbangan, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana*), penempatan orang-orang (*amil*) yang tepat dan pemilihan system pelayanan yang memudahkan ditunjang dengan perangkat lunak

(*software*) yang memadai, kemudian dengan tindakan nyata (*pro active*) melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada muzakki maupun mustahiq dan terakhir adalah pengawasan dari sisi syariah, manajemen dan keuangan operasional pengelolaan zakat (Didin Hafidhudin, 2002: 18).

Badan amil zakat yang profesional tentunya bukan sekedar kumpulan petugas pemungut zakat, melainkan juga para ahli syariat yang akan menentukan kriteria penerima zakat sesuai skala prioritas. Pengelolaan zakat pada masa sekarang harus benar-benar diperhatikan sehingga zakat bisa tersalurkan dengan tepat. Pengelolaan zakat bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, yang terpenting esensi zakat tercapai. Hal ini yang mendorong Badan Amil Zakat untuk berusaha mengelola zakat sebaik-baiknya. Pengelolaan zakat sesuai dengan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, dan
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat (Mamlatul Maghfiroh, 2007: 101).

Pengelolaan zakat dengan berbagai tujuan pada masa sekarang harus tepat sasaran. Dengan begitu, kaum dhuafa sebagai sasaran zakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung. Zakat dapat digunakan antara lain untuk menyediakan pelayanan klinik kesehatan dan klinik bersalin gratis. Ini adalah

salah satu bentuk pengelolaan harta zakat secara profesional dan berdaya guna (Mamlatul Maghfiroh, 2007: 102).

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan antara lain: pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri dari mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. Ketiga, untuk mencapai efisien dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan Syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami (Abdurrahman Qadir, 1998: 87).

Berdasarkan keputusan menteri Agama RI tentang pelaksanaan undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat disebutkan pada pasal 2 mengenai susunan organisasi poin 3 badan amal zakat mempunyai susunan hierarki mulai dari Badan Amil Zakat Nasional yang berkedudukan di Ibu kota negara, Badan Amil Zakat Propinsi berkedudukan di ibu kota propinsi, Badan Amil Zakat daerah berkedudukan di ibu kota kabupaten, dan terakhir Badan Amil Zakat kecamatan yang berkedudukan di ibu kota kecamatan (Arief Mufraini, 2008: 138).

Dalam Undang-undang RI No 38 tahun 1999 bahwa pengumpulan zakat diatur dalam pasal 11, 12, 13, 14, dan 15 yang berisi tentang:

Pasal 11 berbunyi sebagai berikut : pertama, zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah. Kedua, harta yang dikenai zakat adalah emas, perak, dan uang,

perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa serta rikaz. Ketiga, penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama. Pasal 12 yaitu : pertama, pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Kedua, badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki. Pasal 13 berbunyi: Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat dan kafarat. Pasal 14 mengatakan bahwa: pertama, muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, muzakki dapat meminta bantuan kepada lembaga amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya. Ketiga, zakat telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba / pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pasal 15 menyatakan bahwa lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri (Depag RI, UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Bab IV : 8-9).

Pendayagunaan zakat meliputi pasal 16 dan 17 yang menyatakan bahwa : pasal 16 pertama, hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama. Kedua, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dana dapat dimanfaatkan untuk

usaha yang produktif. Ketiga, persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan keputusan menteri. Sedangkan dalam pasal 17 mengatakan bahwa hasil penerimaan infak, sedekah, hibah, wasiat, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif (Depag RI, UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Bab V : 10-11).

Menurut UU RI No. 38 Tahun 1999 menerangkan bahwa yang meliputi pengawasan zakat adalah terdiri dari pasal 18, 19, dan pasal 20 yang berbunyi : pertama dalam pasal 18 yaitu : pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksud dengan dalam pasal 6 ayat (5), pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota, Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat, dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik. Kedua, dalam pasal 19 menyatakan bahwa badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya. Ketiga, dalam pasal 20 mengatakan masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat (Depag RI, UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat Bab VI : 11-12).

Hasil pengumpulan zakat oleh Badan Amil Zakat selanjutnya didayagunakan untuk para mustahik sesuai dengan ketentuan agama berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik. Sebelum disalurkan, tentu saja diperlukan adanya Riset dan penelitian tentang jumlah fakir miskin disuatu wilayah tertentu

lengkap dengan potensi pengembangan sumber daya manusianya. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

1. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf, yaitu fakir, miskin, mualaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.
2. Pengutamaan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
3. Pengutamaan mustahik di wilayahnya masing-masing (Mamlatul Maghfiroh, 2007: 103).

Adapun Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:

1. Melakukan Studi kelayakan
2. Menetapkan Jenis usaha produktif
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
4. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan.
5. Mengadakan evaluasi
6. Membuat Laporan (Mamlatul Maghfiroh, 2007: 103).

Idealnya zakat ataupun infak yang diberikan harus bisa menyelesaikan problem kemiskinan dengan cara memberi peluang, pelatihan, pendidikan, motivasi, dan modal rill untuk usaha. Dari bekal-bekal itulah para mustahik diharapkan bisa merubah nasibnya dan terdongkrak ekonominya. Pendistribusian zakat yang telah diterima ditujukan untuk membantu beragam masalah umat.

Dana yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin masyarakat (Mamlatul Maghfiroh, 2007: 103).

d. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik (Abdurrahman Qadir, 1998 : 46).

Sebenarnya, bila kita memeperhatikan keadaan fakit miskin, maka tetap ada zakat konsumtif, walaupun ada kemungkinan melaksanakan zakat produktif. Anak-anak yatim yang belum bisa berusaha, orang jompo atau orang dewasa yang tidak bisa bekerja karena sakit atau cacar, maka zakat konsumtif tidak bisa dihindari, mereka wajib disantuni dari sumber-sumber zakat dan infak lainnya. Kemudian bagi mereka yang masih kuat bekerja dan bisa mandiri dalam menjalankan usaha, maka dapat ditempuh dua cara yaitu memberi modal kepada perorangan atau kepada perusahaan yang dikelola secara kolektif. Pemberian modal kepada perorangan harus dipertimbangkan dengan matang oleh amil. Apakah mampu orang tersebut mengolah dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapkan zakat. Apabila hal ini dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari amil maka secara berangsur-angsur orang yang tidak punya (melarat) akan terus berkurang dan tidak tertutup kemungkinan diapun bisa menjadi muzakki bukan lagi sebagai mustahik (Ali Hasan, 2000: 23).

Sekiranya usaha itu dikelola secara kolektif, maka orang-orang fakir miskin yang mampu bekerja menurut keahliannya masing-masing mesti diikutsertakan. Dengan demikian jaminan biaya sehari-hari dapat diambil dari usaha bersama itu. Apabila usaha itu berhasil, maka mereka menikmati bersama juga hasilnya itu. Hal ini tentu memerlukan manajemen yang teratur rapi dan sebagai pimpinannya dapat ditunjuk dari kalangan orang-orang yang tidak mampu atau ditunjuk orang lain yang ikhlas beramal membantu mereka. Berdasarkan penjelasan diatas zakat produktif bertujuan untuk merubah status dari mustahik menjadi muzakki dan pengembangan harta zakat (Ali Hasan, 2000: 23).

#### 1.6.2 Konsep Operasional

Konsep Operasional merupakan konsep yang digunakan untuk memberi batasan terhadap konsep teoritis. Agar tidak terjadi salah pengertian, maka terlebih dahulu penulis menentukan konsep operasional. Untuk mengetahui Profesionalisme pengurus amil zakat dalam mengelola zakat produktif dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Pengurus menerapkan ilmu yang dimiliki dalam mengelola zakat produktif.
- b. Pengurus memiliki sikap mental yang positif dalam mengelola zakat produktif.
- c. Pengurus mempunyai kemampuan bekerja sama dengan orang banyak.
- d. Pengurus mempunyai kemauan keras untuk mempelajari profesinya.
- e. Pengurus mempunyai kemauan untuk bekerja keras
- f. Pengurus menguasai dengan baik dasar-dasar pekerjaannya



- g. Pengurus menjadikan pekerjaan tersebut sebagai sumber nafkah
- h. Pengurus mempunyai kemampuan untuk membedakan masalah pribadi dengan organisasi
- i. Pengurus melakukan pekerjaan berdasarkan tanggung jawab yang tinggi.
- j. Pengurus melakukan pekerjaan berdasarkan kode etik tertentu
- k. Pengurus memiliki pengalaman yang cukup.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun Yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Propinsi Riau yang terletak di Mesjid Agung An-nur Pekanbaru. Sementara waktu yang dilakukan untuk penelitian adalah pada bulan April-mei Tahun 2010.

### **1.7.2 Subjek dan Objek Penelitian**

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pengurus Badan Amil Zakat. sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah profesionalisme pengurus Badan Amil Zakat Propinsi Riau dalam pengelolaan zakat Produktif.

### **1.7.3 Populasi dan Sampel**

Adapaun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus badan amil zakat Propinsi Riau yang berjumlah 27 orang. Karena jumlah populasi dalam penelitian ini tidak begitu banyak maka penulis mengambil seluruh untuk diteliti. Karena penulis mengambil seluruh populasi untuk diteliti maka penelitian ini disebut penelitian populasi.(Suharsimi Arikunto, 1997: 115)

#### 1.7.4 Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari observasi, kepustakaan berupa buku-buku dan dari dokumentasi.

#### 1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara yaitu mengajukan sejumlah pertanyaan secara langsung kepada responden mengenai penelitian ini. Adapun yang menjadi objek wawancara dalam penelitian ini adalah pengurus Badan Amil Zakat Propinsi Riau yang berjumlah 5 orang.
- b. Observasi yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian dengan cara mencatat sistematis terhadap gejala-gejala yang terdapat pada objek penelitian.
- c. Dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau tentang pelaksanaan dan pengelolaan zakat.

#### 1.7.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat diskriptif kualitatif atau pemaparan dan menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat data yang telah diperoleh untuk memperoleh kesimpulan, kemudian data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan kalimat-kalimat tidak dengan bentuk angka. Adapun yang

menjadi ukuran dalam profesionalisme terdapat dalam konsep operasional, yang dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

### **1.8 Sistematis Penulisan**

Untuk mempermudah pembaca dalam menelaah serta memahami penelitian ini, maka penulis menyusun laporan penelitian ini dalam lima bab :

#### **BAB I      Pendahuluan**

- a. Latar Belakang
- b. Alasan Pemilihan Judul
- c. Penegasan Istilah
- d. Permasalahan
- e. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- f. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional
- g. Metode Penelitian
- h. Sistematika Penulisan.

#### **BAB II      Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

- a. Sejarah BAZ
- b. Struktur Organisasi BAZ
- c. Tempat Kedudukan dan Daerah Kerja BAZ
- d. Program Kerja BAZ

**BAB III**    Deskripsi tentang pengelolaan zakat produktif yang terdiri dari profesionalisme pengurus amil zakat BAZ Propinsi Riau dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

BAB IV    Analisa tentang pengelolaan zakat produktif yang terdiri dari profesionalisme pengurus amil zakat BAZ Propinis Riau dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

BAB V    Penutup

Dalam Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **1.1 Sejarah Badan Amil Zakat**

Lembaga resmi yang bertugas mengelola zakat, infak, dan sedekah di provinsi Riau pertama kali dibentuk dengan surat keputusan Gubernur kepala Daerah tingkat I Riau Nomor keputusan. 533/XII/1987 dan Nomor keputusan. 533/XII/1987 tanggal 12 Desember 1987 dengan nama Badan Amil Zakat, infak, sedekah, dan baitul maal atau disingkat BAZISMAL Provinsi Riau.

Pada tahun 1991 keluar keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI nomor 29 tahun 1991 dan nomor 47 tahun 1991 tentang pembinaan zakat. atas dasar keputusan bersama tersebut, maka gubernur kepala daerah tingkat I Riau mengeluarkan surat keputusan Nomor Keputusan. 657/X/1992 tanggal 8 oktober 1992 tentang pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat, infak, dan sedekah (BAZIS) Provinsi Riau periode 1992-1997. Setelah berakhir masa kerja pengurus BAZIS Provinsi Riau periode tahun 1992-1997 dilanjutkan oleh pengurus BAZIS Riau periode tahun 1998-2003 yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur Riau Nomor kepts. 585/XII/1998 tanggal 17 Desember 1998.

Pada tahun 1999 disahkan berlakunya UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. atas dasar itu pula kepengurusan BAZIS provinsi Riau menyesuaikan dengan maksud UU tersebut, maka nama BAZIS Provinsi Riau berubah menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Riau. Pertama kali

kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Riau mengacu kepada UU No. 38 tahun 1999 adalah kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) provinsi Riau periode 2000-2003 dengan keputusan Gubernur Riau Nomor Kepts. 263/VI/2000. Selanjutnya kepengurusan Badan Amil Zakat Provinsi Riau dari periode ke periode mengacu kepada UU No. 38 tahun 1999. (Dokumentasi, 4 mei 2010)

## **1.2 Dasar Hukum Badan Amil Zakat Provinsi Riau**

- a. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
- b. Keputusan menteri agama RI Nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
- c. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.
- d. Peraturan daerah Provinsi riau nomor 2 tahun 2009 tentang pengelolaan zakat.
- e. Keputusan Gubernur Riau Nomor : 66/I/2010

## **1.3 Visi dan Misi**

### **1.3.1 Visi**

Terwujudnya Badan pengelolaan zakat yang amanah dan profesional di Provinsi Riau.

### **1.3.2 Misi**

- a. Mewujudkan Manajemen yang modern, profesional dan transparan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan kesadaran umat Islam untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah.

- c. Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemberdayaan sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi umat.
- d. Menjangkau muzakki dan mustahik yang seluas-luasnya.
- e. Mengembangkan budaya memberi lebih baik dari pada meminta dikalangan umat islam. (Dokumentasi, 4 mei 2010)

#### **1.4 Susunan Pengurus**

##### **1.4.1 Dewan Pertimbangan**

Ketua	: Gubernur Riau
Wakil Ketua	: Ketua DPRD Provinsi Riau
Sekretaris	: KA. Kementrian Agama Prov. Riau
Wakil Sekretaris	: Rektor UIN Suska Riau
Anggota	: DR. H. Mustafa Umar, MA
Anggota	: Ir. H. Zulkifli Saleh
Anggota	: Drs. H. Yusuf Ahmad

##### **1.4.2 Komisi Pengawas**

Ketua	: Drs. H. Wan Syamsir Yus
Wakil Ketua	: Prof. Dr. H. Hamdani, MA
Sekretaris	: Drs. H. Said Saqlul Amri
Wakil Sekretaris	: Prof. DR. H. Irwan Efendi, M. Sc
Anggota	: Drs. H. Bin Fajri
Anggota	: DR. Heri Sunandar, MCL
Anggota	: dr. H. Marwan Awaluddin

#### 1.4.3 Badan Pelaksana

Ketua : Drs. H. Auni M. Noor, M. Si

Wakil Ketua I : H. Azwar Aziz, SH. M. Si

Wakil Ketua II : Drs. H. Jalaluddin

Sekretaris : Drs. H. Syamsul

Wakil Sekretaris I : Drs. H. Irhas

Wakil Sekretaris II : Marila, S. Ag

Benadahara : Mahmud, M, Bc. Hk

#### 1.4.4 Bidang Pengumpulan

Ketua : H. Fajeriansyah, Lc. MA

Sekretaris : DR. Hj. Daharmi Astuti, Lc. MA

Anggota : H. Heri Indra Putra, SE

Anggota : H. Soeripto Hasan

Anggota : Drs. H. Sukmadi Mukmin

#### 1.4.5 Bidang Pendistribusian

Ketua : Drs. H. Zulkifli

Sekretaris : Muhammad Yunus, SHI

Anggota : Ardison, S. Ag

Anggota : H. Hamdan Yahfiz, S. PdI

Anggota : H. Hasan Amal

#### 1.4.6 Bidang Pendayagunaan

ketua : Drs. H. Syahrial Ali, M. Ag



Sekretaris : Jamhur Rahmat, Lc. MA  
Anggota : Drs. Ahmad Syfruddin, MA  
Anggota : Musliadi, S. Ag  
Anggota : Bahruslim

#### 1.4.7 Bidang Pengembangan

Ketua : Drs. H. Ahmad Supardi, MA  
Sekretaris : Edi Ahmad, SIP, MAP  
Anggota : H. Abdul Somad, Lc. MA  
Anggota : Abdul Wahid, S. Ag  
Anggota : Drs. H. Abdul Razak, MM (Observasi, 5 Mei 2010)

### 1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Amil Zakat

#### 1.5.1 Tugas Pokok

- a. Berdasarkan UU No 38 tahun 1999 pasal 8 dan 9 tugas pokok Badan Amil Zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan medayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
- b. Bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya (BAZ Provinsi Riau ke Gubernur Riau dan ketua DPRD provinsi Riau)

#### 1.5.2 Funsu dan Tugas

Masing-masing satuan pada kepengurusan Badan Amil Zakat berdasarkan keputusan mentri agama RI Nomor 373 tahun 2003 dan keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

a. Dewan Pertimbangan

Fungsi: Memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

Tugas:

1. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat bersama komisi pengawas dan badan pelaksana.
2. Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat.
3. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi pengawas.
4. Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

b. Komisi Pengawas

Fungsi: Melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.

Tugas:

1. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
4. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'an dan peraturan perundang-undangan.

5. Menunjuk akuntan publik.

c. Badan Pelaksana

Fungsi: Melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.

Tugas:

1. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
2. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Menyusun laporan tahunan.
4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah dan dewan perwakilan rakyat sesuai tingkatannya.
5. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun ke luar.

d. Tugas Bidang-Bidang pada Badan Pelaksana

1. Bidang Pengumpulan

- a. Mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah baik dari perorangan maupun badan.
- b. Membentuk unit pengumpulan zakat (UPZ) pada instansi/lembaga pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.

- c. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak (seperti bank, perusahaan dll) di wilayah kerjanya dalam pengumpulan dana zakat dari harta muzakki yang disimpan di bank atau perusahaan atas persetujuan muzakki.
- d. Menyebarkan program zakat melalui berbagai media seperti iklan, ceramah, seminar, khutbah, dan lain-lain.

## 2. Bidang Pendistribusian

- a. Menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
- b. Menyalurkan zakat harus bersifat hibah dan harus memperhatikan skala prioritas di wilayahnya.
- c. Menyalurkan zakat dapat bersifat bantuan sesuatu yaitu membantu mustahik dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak (darurat).
- d. Menetapkan persyaratan dan meneliti kebenaran calon mustahik yang akan menerima zakat.

## 3. Bidang Pendayagunaan

- a. Menyalurkan zakat yang bersifat bantuan pemberdayaan yaitu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik baik secara perorangan maupun kelompok melalui program yang berkesinambungan.
- b. Menyusun dan menetapkan prosedur program pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - 1. Melakukan studi kelayakan.
  - 2. Menetapkan jenis usaha produktif

3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
  4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
  5. Mengadakan evaluasi dan membuat laporan
- c. Memprioritaskan mustahik yang akan berusaha yang berpeluang menguntungkan.
  - d. Menetapkan persyaratan dan meneliti kebenaran calon mustahik yang akan mendapatkan zakat untuk usaha produktif.
4. Bidang Pengembangan
    - a. Melaksanakan penelitian tentang pengembangan zakat.
    - b. Memberikan informasi dan edukasi tentang zakat.
    - c. Melaksanakan konsultasi, koordinasi dengan berbagai pihak tentang zakat.
    - d. Melaksanakan sosialisai mengenai peraturan perundang-undangan tentang zakat dan fiqh zakat. (Dokumentasi, 5 Mei 2010)

### **1.6 Program Unggulan Badan Amil Zakat.**

Disamping tupoksi, masih perlu dilakukan program-program lain yang bertujuan untuk membantu sesama umat serta mewujudkan kesejahteraan umat secara menyeluruh yang harus direalisasikan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Riau yaitu:

- a. Program Riau Takwa. Program ini ditujukan untuk membangun dan memperkuat keimanan dan ketakwaan masyarakat, melalui pengiriman da'i ke berbagai daerah, berkerjasama dengan ormas-ormas Islam, termasuk da'i serta kaderisasi para ulama muda.

- b. Program Riau Peduli. Program ini ditujukan untuk menanggulangi berbagai macam musibah di berbagai macam daerah, yang sering terjadi di Provinsi Riau, seperti di Kab/kota dan tempat-tempat lainnya. Program ini mulai dari tahap darurat sampai membangun kembali sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- c. Program Riau Makmur. Program ini ditujukan untuk menumbuhkan kemandirian mustahik dan syukur-syukur menjadi muzakki. Antara lain dengan didirikan kampung binaan di beberapa daerah, pelatihan wirausaha/wiraswasta, pemberian modal usaha bagi pengusaha ekonomi lemah dan sebagainya.
- d. Program Riau Cerdas. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikannya. seperti program pemberian beasiswa dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi, program SKSS (satu keluarga satu sarjana), yaitu memberikan beasiswa kepada para mahasiswa yang membutuhkan, bekerjasama dengan dikti dan perguruan tinggi, mendirikan rumah pintar/taman bacaan, mobil pintar dan sebagainya.
- e. Program Riau Sehat. Program ini ditujukan untuk memberikan pengobatan secara Cuma-Cuma untuk dhuafa dan masakin, seperti mendirikan rumah sehat di halaman mesjid-mesjid, memperjalankan setiap hari mobil kesehatan lengkap dengan obat dan tim dokternya bekerjasama dengan dinas kesehatan dan PMI Provinsi Riau. (Dokumentasi, 5 Mei 2010)

### **BAB III**

## **DESKRIPSI TENTANG PROFESIONALISME PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT PROVINSI RIAU DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA**

### **1.1 Profesionalisme Pengurus Badan Amil Zakat**

Pada bab ini, data yang disajikan berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan di Badan Amil Zakat Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang profesionalisme pengurus badan amil zakat dalam mengelola zakat produktif . Adapun teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara langsung, observasi dan didukung dengan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan angket, karena penelitian ini bersifat diskriptif kualitatif.

Wawancara yang penulis lakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan lisan yang berkaitan dengan kajian yang akan diteliti oleh penulis, dengan tujuan untuk memperkuat hasil penelitian.

Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih akurat untuk mendukung dari data wawancara yang telah didapatkan, untuk itulah observasi ini dilakukan agar data tersebut terbukti kebenarannya.

Dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk melengkapi data-data penelitian, yaitu dalam bentuk foto-foto yang berhubungan dengan penelitian. Adapun pengambilan data dilakukan di Badan

Amil Zakat Provinsi Riau. Setelah penulis memperoleh data dari hasil penelitian maka penulis merumuskan hasil penyajian data sebagai berikut:

1. Pengurus Badan Amil Zakat menerapkan ilmu atau pengetahuan dalam mengelola zakat produktif.

Ilmu merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu pekerjaan, karena tanpa adanya ilmu maka pekerjaan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Demikian juga dengan Pengurus badan amil zakat yang tugasnya untuk mengelola zakat, maka harus memiliki ilmu tentang bagaimana cara mengelola zakat dengan baik, kemudian menerapkan ilmu mereka dalam mengelola zakat produktif tersebut, sebagaimana mereka dapatkan dalam pendidikan maupun pelatihan yang telah didapatkan.

Menurut Auni M Noor pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Riau seluruhnya memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam mengelola zakat produktif, kemudian para pengurus mendapatkan pelatihan-pelatihan yang mendukung untuk pelaksanaan zakat, baik itu pelatihan yang dilaksanakan oleh Baznas maupun dari pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh kementerian agama maupun BAZ Provinsi Riau. Setelah adanya pelatihan tersebut para pengurus memberikan perubahan dan hasil yang sangat memuaskan dalam menjalankan tugasnya, dan mereka selalu melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kesalahan yang mereka lakukan ketika mereka belum mendapatkan pelatihan dan pengetahuan. Dengan adanya pelatihan ini pengurus mendapatkan pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana mengelola zakat khususnya zakat produktif. Sebagaimana dalam ciri-ciri seorang profesionalisme mereka mampu



untuk menerapkan ilmu yang telah mereka dapatkan baik dari pendidikan maupun dari pelatihan-pelatihan yang diadakan. (wawancara, senin 31 mei 2010)

2. Sikap yang dimiliki oleh pengurus badan amil zakat dalam mengelola zakat produktif.

Memiliki sikap yang positif merupakan titik awal sekaligus faktor utama dalam mencapai sukses yang diinginkan, baik itu dalam kehidupan maupun dalam karir, jika kita hanya mempunyai ilmu tanpa diiringi dengan memiliki sikap yang positif maka tidak akan berhasil setiap pekerjaan yang kita jalankan. Untuk itu memiliki sikap positif merupakan suatu yang sangat penting dalam menjalankan suatu pekerjaan maupun kehidupan. Begitu juga menjadi seorang pengurus amil zakat harus memiliki sikap yang positif dalam mengelola zakat.

Syamsul mengatakan para pengurus badan amil zakat memiliki sikap yang positif dalam mengelola zakat khususnya zakat produktif yang artinya pengurus amil zakat memiliki sifat jujur, cermat, tepat waktu, rasa tanggung jawab, penuh perhatian, mengutamakan pekerjaan, dan menjaga kualitas pekerjaan, sehingga dalam mengelola zakat produktif mendapatkan hasil yang maksimal. Sikap tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam melayani dan melaksanakan zakat produktif, karena jika pengurus tidak memiliki sikap tersebut maka para muzakki dan mustahik tidak akan percaya dan mau untuk membayar zakat dan menerima zakat tersebut dari pengurus amil zakat. Dalam melayani para muzakki dan mustahik pengurus melayani dengan maksimal sehingga para muzakki dan mustahik mendapatkan apa yang mereka inginkan, baik itu mereka membayar zakat maupun menerima zakat. (wawancara, sabtu 15 mei 2010)

3. Pengurus mampu berkerja sama dengan orang lain dalam mengelola zakat produktif.

Menurut Bapak mahmud (wawancara, senin 17 mei 2010) Pengurus amil zakat memiliki hubungan kerja sama dengan pihak lain yang mampu untuk mendukung terlaksananya pengelolaan zakat yaitu dengan bank mandiri, bank riau, bank syari'ah mandiri, bank muamalat, bank riau syari'ah, BPR payung negeri bestari, instansi pemerintah, UIN suska Riau dan perusahaan-perusahaan swasta lainnya.

Pengurus amil zakat juga memiliki hubungan keaja sama yang baik dengan pengurus lainnya, karena hubungan kerja dengan sesama pengurus merupakan hal yang sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan zakat. Pengurus mengadakan rapat kerja untuk selalu menjalin kerja sama antara sesama pengurus dimana dalam rapat tersebut membahas tentang program kerja dan evaluasi terhadap program kerja yang telah dilaksanakan maupun belum dilaksanakan. Bekerja sama merupakan suatu proses awal dari pekerjaan yang akan dilaksanakan.

4. Pengurus mempelajari profesinya.

Profesi merupakan pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk mendapatkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Seseorang yang menjalankan suatu profesi harus mempunyai pengetahuan, ketrampilan, dan wawasan tentang apa yang akan dia kerjakan, dan mereka akan menjadikan profesi tersebut sebagai tempat untuk mereka menerapkan ilmu yang mereka dapatkan ketika menjalani pendidikan.

Bapak Syamsul mengatakan (wawancara, sabtu 15 mei 2010) pengurus mempelajari profesinya dengan adanya pelatihan-pelatihan yang menjelaskan tentang apa yang harus dikerjakan oleh seorang pengurus amil zakat dan memberikan informasi tentang amil zakat, sehingga para pengurus mampu untuk menjalankan tugasnya dalam mengelola zakat produktif. Kemudian adanya masukan-masukan dari ketua maupun dari rekan kerja yang berpengalaman dalam memberikan pengetahuan tentang tugas-tugas yang akan dilaksanakan, sehingga tidak adanya kesalahpahaman dan kesalahan dalam menjalankan tugas, sehingga tugas tersebut bisa berjalan dengan baik.

5. Pengurus mampu untuk berkerja keras dalam mengelola zakat produktif.

Dalam menjalani kehidupan ini dibutuhkan kerja keras, untuk meraih kesuksesan dan mampu untuk mengemban amanat yang Allah SWT berikan kepada kita dalam menjalani kehidupan ini, tidak ada kesuksesan dan kemuliaan yang dicapai tanpa adanya kerja keras, apalagi dalam pelaksanaan mengelola zakat yang merupakan rukun islam ke empat, haruslah dilaksanakan dengan kerja keras dan sepuh hati.

Menurut Bapak Syamsul (wawancara, sabtu 15 mei 2010) Pengurus amil zakat selalu bekerja keras untuk menjalankan tugasnya, sehingga pengelolaan zakat bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misi dari Badan Amil Zakat. Pengurus selalu berusaha untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin dan dengan sepuh hati. Pak syamsul juga mengatakan Bekerja keras tidak cukup untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tetapi bekerja harus dengan ikhlas dan cermat, sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik.

Para pengurus juga selalu melaksanakan tugas dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Pengurus sudah banyak memberikan sumbangsih terhadap instansi maupun bidangnya, baik itu dalam bentuk pemikiran, waktu maupun tenaga.

6. Pengurus menguasai dengan baik dasar-dasar pekerjaannya.

Menurut Bapak Auni M. Noor (wawancara, senin 31 mei 2010) Pengurus badan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-undang dan program kerja yang telah disepakati bersama, sehingga pekerjaan yang dilaksanakan berjalan dengan semestinya dan tidak ada kesalahan yang dilakukan ketika melaksanakan program kerja. Adapun dasar-dasar pelaksanaan zakat produktif adalah:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Memberikan arahan terhadap jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat laporan

Adapun yang menjadi dasar tugas dalam menyalurkan zakat produktif tersebut adalah:

- a. menyeleksi dan menerima permohonan calon mustahik
- b. Mencatat mustahik yang memenuhi syarat menurut kelompoknya masing-masing

- c. Melaksanakan penyaluran zakat sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.
- d. Menyiapkan rancangan keputusan tentang mustahik yang menerima zakat.
- e. Mencatat penyaluran zakat sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.
- f. Menyiapkan laporan

Dengan adanya dasar-dasar pelaksanaan zakat produktif, maka pengurus menjalankan tugasnya sesuai dengan dasar-dasar pelaksanaan zakat produktif. Kemudian dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada pengurus maka pengurus akan lebih menguasai dan mengetahui dasar-dasar pelaksanaan zakat produktif.

#### 7. Pengurus menjadikan pekerjaan ini sebagai sumber nafkah.

Seorang yang profesional harus mendapatkan imbalan yang setimpal dengan apa yang telah mereka kerjakan, jika tidak adanya imbalan yang diberikan, maka seseorang yang menjalankan tugasnya atau menjalankan profesinya tidak akan melaksanakan kewajibannya dengan semaksimal mungkin, karena imbalan merupakan harga yang harus dibayar kepada orang yang menjalani profesinya untuk suatu instansi atau perusahaan tertentu.

Menurut Bapak Auni M. Noor (wawancara, senin 31 mei 2010) pengurus amil zakat provinsi Riau sebagian besar menjadikan pekerjaan ini sebagai pekerjaan sampingan, hanya sebagian kecil yang menjadikan pekerjaan pengurus amil zakat ini sebagai pekerjaan tetap, banyak dari pengurus bekerja diluar badan amil zakat, ada yang bekerja sebagai instansi pemerintah, dosen, dan lain sebagainya. Karena kurangnya imbalan yang mereka dapatkan dalam menjalankan

tugasnya, sehingga mereka tidak bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal. Dalam menjalankan kehidupan ini membutuhkan biaya yang sangat besar, sementara profesi sebagai seorang amil mendapatkan imbalan yang sangat kecil, tetapi mereka menjadikan pekerjaan ini sebagai kewajiban mereka terhadap Allah SWT, para pengurus memotivasi diri mereka dengan menanamkan dalam diri bahwa pekerjaan sebagai amil ini merupakan amal ibadah, yang mendapatkan imbalan dari Allah SWT, sehingga walaupun mereka mendapatkan imbalan yang kecil tapi mereka berusaha untuk menjalankan tugasnya dengan semaksimal mungkin, sehingga rukun islam yang ke empat bisa berjalan dalam kehidupan masyarakat muslim.

8. Pengurus mampu untuk membedakan masalah pribadi dengan masalah organisasi.

Bapak Auni M. Noor mengatakan (wawancara, senin 31 mei 2010) dalam menyelesaikan pekerjaannya para pengurus tidak mencampur adukkan masalah keluarga dengan masalah kantor, karena apabila pekerjaan itu dicampur adukkan maka tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Pengurus badan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya selalu tepat waktu dan tidak pernah melalaikan tugas yang telah diberikan kepada mereka, sehingga tidak ada pekerjaan yang terbengkalai dan tidak selesai.

9. Tanggung jawab pengurus dalam mengelola zakat produktif.

Tanggung jawab merupakan sesuatu yang harus kita lakukan agar kita menerima sesuatu yang dinamakan hak, tanggung jawab juga merupakan perbuatan yang sangat penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, karena

tanpa tanggung jawab, maka semuanya tidak akan berjalan dengan baik. Bagaimanapun juga tanggung jawab menjadi nomor satu di dalam kehidupan seseorang baik itu dalam menjalani kehidupan maupun dalam menjalankan profesinya, dengan adanya tanggung jawab, maka kita akan dipercaya orang lain, selalu tepat melaksanakan sesuatu, mendapatkan hak dengan wajarnya. Jika seseorang melalaikan tanggung jawab terhadap suatu pekerjaan, maka kualitas dari diri seseorang akan berkurang. Maka tanggung jawab adalah suatu hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan dan profesi ,karena tanggung jawab menyangkut orang lain dan diri kita sendiri.

Bapak Syamsul mengatakan (wawancara, sabtu 15 mei 2010) bahwa pengurus badan amil zakat memiliki tanggung jawab yang sangat tinggi terhadap tugas yang diberikan kepada mereka, bahkan para pengurus badan amil zakat Provinsi Riau menganut moto yaitu *don't wait until tomorrow, if you can do it now*, mereka selalu berusaha untuk menyelesaikan tugasnya tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang amil zakat para penguus senantiasa menggunakan pertimbangan syari'ah dan moral dalam semua kegiatan yang dilakukan. Pengurus badan amil zakat juga mempunyai peranan yang penting dalam masyarakat, dan harus selalu bertanggung jawab untuk bekerjasama dengan sesama pengurus untuk mengembangkan profesi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur diri dan lembaganya sendiri.

Pengurus badan amil zakat juga mempunyai tanggung jawab kepada para muzakki, mustahik, lembaga yang bersangkutan, dan publik dalam mengelola zakat produktif. dengan cara:

- a. Pengurus tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan informasi muzakki yang rahasia tanpa adanya persetujuan dari muzakki.
- b. Memberikan laporan kepada muzakki
- c. Memberikan bantuan dan pemberdayaan kepada mustahik
- d. Memelihara citra sebagai seorang pengurus amil zakat
- e. Menjaga komunikasi antar sesama pengurus
- f. Menjaga perbuatan dan perkataan
- g. Adanya transparansi kepada publik.

10. Pengurus melaksanakan tugas dan berdasarkan kode etik yang berlaku.

Kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kode etik, maka pekerjaan yang dilaksanakan seseorang akan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan tidak akan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Maka dalam menjalankan suatu profesi harus memiliki kode etik.

Bapak syamsul menceritakan (wawancara, sabtu 15 mei 2010) bahwa pengurus selalu menjalankan tugasnya berdasarkan kode etik. Pengurus amil zakat memberikan nama terhadap rencana pekerjaannya yaitu job diskription yaitu gambaran terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan selama masa jabatannya. Dengan job diskription ini, maka pengurus akan selalu berpedoman terhadap pekerjaan yang dilaksanakannya, dan diharapkan agar pekerjaan mereka berjalan



sesuai dengan perencanaan. Kode etik pengurus amil zakat juga dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh amil, baik yang bekerja di lingkungan Badan Amil Zakat, lembaga Amil Zakat, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesinya. Kode etik amil zakat memuat prinsip-prinsip etika dan aturan-aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian pelayanan/jasa pengelolaan zakat oleh amil zakat.

11. Apakah pengurus memiliki pengalaman dalam mengelola zakat produktif.

Pengalaman merupakan guru yang sangat baik bagi kita, untuk menjalani kehidupan maupun dalam menjalankan karir. Dengan memiliki pengalaman yang cukup kita akan lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, karena kita sudah terlatih untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Dalam wawancara dengan Bapak Auni M. Noor (senin 31 mei 2010) mengatakan bahwa pengurus badan amil zakat provinsi Riau memiliki pengalaman yang sangat bervariasi, ada yang sangat berpengalaman karena sudah lama bekerja di Badan Amil Zakat Provinsi Riau dan ada juga yang minim pengalaman karena mereka masih baru menjadi pengurus badan amil zakat. Pengurus yang mempunyai pengalaman yang lebih, menjadi contoh dan panutan kepada yang lebih minim pengalaman, serta mereka menjadi tempat untuk bertanya dan bertukar pikiran kepada pengurus yang masih kurang berpengalaman dalam mengelola zakat khususnya zakat produktif.

## **1.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya.**

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam mengelola zakat produktif adalah:

- a. Adanya dukungan dan bantuan dari pemerintah dari pemerintah
- b. Adanya Undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat, sehingga pengurus memiliki kekuatan hukum dalam mengambil dan menyalurkan zakat.
- c. Memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman.
- d. Memiliki lokasi yang sangat strategis
- e. Mempunyai infrastruktur yang memadai dalam mengelola zakat produktif.

Disamping faktor pendukung ada juga yang menjadi faktor penghambat dalam mengelola zakat produktif yaitu:

- a. Perekrutan pengurus yang kurang maksimal oleh kementrian agama.
- b. Masi kurangnya dana operasional untuk menjalankan zakat.
- c. Masi kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.
- d. Kurangnya bantuan dari segala pihak dalam menyukkseskan pengelolaan zakat.
- e. Pembentukan pengurus yang tidak maksimal.

**BAB IV**

**ANALISA TENTANG PROFESIONALISME PENGURUS BADAN AMIL**

**ZAKAT PROVINSI RIAU DAN**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA**

Setelah data penulis sajikan pada bab III, selanjutnya adalah menganalisis data yang sudah penulis dapatkan dalam penelitian, untuk mengetahui Profesionalisme pengurus Badan Amil Zakat dalam mengelola zakat produktif. Analisis data yang penulis lakukan adalah dengan cara analisis diskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kembali data riil yang penulis dapatkan di lapangan dimana penulis melakukan penelitian. Untuk lebih jelasnya data tersebut penulis analisis sebagai berikut:

**1.1 Profesionalisme Pengurus Badan Amil Zakat**

Berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan Bapak Auni M. Noor senin, 31 mei 2010 tentang adanya penerapan ilmu yang dilakukan oleh para pengurus badan amil zakat dalam mengelola zakat produktif adalah para pengurus badan amil zakat provinsi Riau menerapkan ilmu yang telah mereka dapatkan baik dari pendidikan maupun dari pelatihan-pelatihan yang mereka dapatkan, baik itu pelatihan yang diadakan oleh Baznas maupun dari Kementrian agama, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja para pengurus badan amil zakat dalam mengelola zakat produktif. Menurut hemat penulis para pengurus badan amil zakat Provinsi Riau sudah benar-benar menerapkan ilmu yang mereka dapatkan dalam mengelola zakat produktif, karena pelaksanaan zakat produktif

oleh pengurus badan amil zakat, berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan syari'ah agama islam, walaupun pengelolaan tersebut masih kurang efektif. Para pengurus badan amil zakat selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi para muzakki dan mustahik, agar para muzakki dan mustahik percaya kepada tugas yang dilaksanakan oleh pengurus badan amil zakat Provinsi Riau. Pengurus badan amil zakat dalam mengelola zakat produktif tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku tentang pengelolaan zakat tahun 1999 dan syari'ah Islam, tetapi mereka menjadikan Undang-undang, peraturan daerah, dan syari'ah agama islam sebagai pedoman bagi mereka dalam mengelola zakat produktif. Hal ini yang membuktikan bahwa mereka melaksanakan pengelolaan zakat produktif dengan ilmu yang mereka ketahui dan mereka dapatkan.

Sikap para pengurus badan amil zakat dalam mengelola zakat produktif, sebagaimana wawancara dengan bapak Syamsul pada hari sabtu 15 mei 2010 para pengurus amil zakat memiliki sikap yang positif dalam mengelola zakat produktif, yaitu sikap yang amanah, jujur, cermat dan sebagainya, yang sesuai dengan syari'ah dan undang-undang. Menurut penulis sikap yang dimiliki oleh para pengurus badan amil zakat provinsi Riau sudah sangat baik dalam mengelola zakat produktif, karena mereka selalu menajaga sikap positif tersebut dalam kehidupan mereka dan selalu diterapkan dalam mengelola zakat produktif, sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang seharusnya tidak terjadi. Sikap tersebut merupakan hal yang sangat dibutuhkan bagi para pengurus badan amil zakat, agar para muzakki dan musthik percaya kepada para pengurus

untuk mengelola zakat produktif, jika pengurus tidak memiliki sikap tersebut maka pelaksanaan zakat tidak akan terlaksana dengan sempurna.

Dalam hal bekerja sama pengurus badan amil zakat Provinsi Riau, berdasarkan wawancara dengan bapak Mahmud senin 17 mei 2010, bahwa pengurus badan amil zakat memiliki kerja sama yang sangat solid dalam melaksanakan program kerja yang telah direncanakan sebelumnya, mereka selalu berusaha untuk merealisasikan program kerja yang telah dibuat sehingga tercapainya visi dan misi dari badan amil zakat itu sendiri dan Badan Amil Zakat juga menjalin hubungan kerja sama dengan pihak lain yang bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan zakat produktif dalam kehidupan beragama Islam. Menurut hemat penulis kerja sama antara pengurus badan amil zakat berjalan dengan sempurna, karena mereka selalu mengadakan rapat kerja perbulan dan pertahun, sehingga mereka selalu menjalin silaturahmi yang baik dan hubungan kerja antar sesama pengurus, bahkan badan amil zakat mampu menjalin kerja sama dengan pihak lain, yang sampai sekarang berjalan dengan baik, tanpa ada permasalahan, baik itu hubungan kerja dengan pihak swasta maupun dengan pihak instansi pemerintah. Para pengurus juga memberikan laporan dari pelaksanaan zakat yang telah terlaksana kepada mitra kerja mereka, sehingga hubungan kerja yang dijalin tidak akan sia-sia. Hubungan kerja ini sangat dibutuhkan dalam menyukseskan pelaksanaan zakat, karena tanpa adanya bantuan dari pihak lain maka pelaksanaan zakat tidak akan terlaksana dengan sempurna, pengurus tidak bisa melaksanakan pekerjaan tersebut, jika tidak ada bantuan dari

pihak manapun, sebagaimana manusia tidak bisa hidup tanpa ada bantuan dari lainnya.

Mempelajari profesi merupakan hal yang terpenting dalam menjalankan suatu pekerjaan, apabila seseorang tidak mengetahui profesi yang dijalannya maka tidak akan sukses pekerjaan yang dijalankan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syamsul 15 mei 2010 tentang profesi pengurus badan amil zakat, menurut penulis pengurus badan amil zakat Provinsi Riau sudah memahami dan mengetahui profesi yang mereka jalani, karena semua pengurus badan amil zakat diberikan pelatihan-pelatihan dalam mempelajari profesi yang akan mereka jalani, serta adanya pemberitahuan oleh para pengurus terdahulu atau pengurus yang berpengalaman tentang profesi pengurus badan amil zakat, sehingga pengurus yang baru menjalani profesi ini mengetahui apa yang akan mereka kerjakan dimasa jabatannya. Setiap orang harus mengetahui profesi yang akan dijalankannya, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menjalankan pekerjaan mereka.

Dalam hal bekerja keras dalam mengelola zakat produktif, sebagaimana wawancara penulis dengan Bapak Syamsul sabtu 15 mei 2010, bahwa pengurus badan amil zakat selalu bekerja keras dalam melaksanakan tugasnya. Menurut penulis pengurus badan amil zakat Provinsi Riau bekerja keras dalam mengelola zakat khususnya zakat produktif, karena mereka ingin memeberikan yang terbaik bagi masyarakat muslim dan instansi tempat mereka bekerja. Hal ini didukung dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh pengurus badan amil zakat dalam menyukkseskan pengelolaan zakat baik itu dalam mengumpulkan zakat

maupun dalam pemberian zakat, mereka sebelum memberikan zakat kepada mustahik, terlebih dahulu mereka akan melakukan survei dan wawancara kepada mustahik tersebut, apakah mustahik tersebut berhak untuk menerima zakat atau tidak, baru setelah itu mereka bisa menentukan apa yang akan diberikan kepada mustahik tersebut, begitu juga terhadap muzakki, pengurus badan amil zakat terjun langsung kelapangan untuk mengambil zakat kepada muzakki, kemudian pengurus memberikan pengetahuan atau siraman rohani kepada muzakki, agar muzakki mengerti terhadap zakat yang mereka keluarkan. Dengan kerja keras pengurus badan amil zakat Provinsi Riau, zakat mampu dikumpulkan dan disalurkan sesuai dengan Undang-undang dan syar'ah agama.

Dasar-dasar pekerjaan dalam mengelola zakat produktif oleh pengurus badan amil zakat Provinsi Riau harus dikuasai dengan baik. Wawancara yang dilaksanakan dengan bapak Auni M. Noor senin 31 mei 2010 bahwa pengurus badan amil zakat seluruhnya menguasai dan mengetahui dasar-dasar pekerjaannya dalam mengelola zakat produktif, menurut penulis pengurus badan amil zakat Provinsi Riau sudah mengetahui dengan baik dasar-dasar pekerjaan mereka dalam mengelola zakat produktif, karena dalam melaksanakan zakat mereka selalu berpedoman kepada Undang-undang dan peraturan daerah tentang pengelolaan zakat, serta dalam pelaksanaannya tidak banyak terjadi kesalahan-kesalahan dalam mengelola zakat produktif, walaupun terkadang pengurus tertipu kepada mustahik yang meminta zakat, karena kurang telitinya para pengurus amil dalam mengumpulkan data mustahik tersebut. Pengurus juga mendapatkan arahan-arahan dari ketua dan pengurus yang berpengalaman ketika pengurus

mendapatkan kesulitan dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak terjadi permasalahan yang akan membuat citra badan amil zakat buruk. Adanya arahan-arahan tersebut juga berguna untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas pengurus terhadap dasar-dasar pekerjaannya.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Auni M. Noor senin 31 mei 2010 mengenai pekerjaan amil zakat dijadikan sebagai sumber nafkah pengurus badan amil zakat, menurut hemat penulis pengurus badan amil zakat Provinsi Riau tidak menjadikan profesi ini sebagai sumber nafkah kehidupan bagi mereka, karena sebagian besar pengurus badan amil zakat provinsi riau bekerja di luar badan amil zakat, ada yang bekerja di instansi pemerintah, swasta, dosen, dan lain sebagainya. Pekerjaan amil dijadikan mereka sebagai pekerjaan sampingan yang menurut mereka tidak bisa dijadikan sebagai sumber nafkah dalam menjalani kehidupan, begitu rendahnya bayaran mereka dalam menjalani profesi sebagai amil zakat, membuat banyak yang tidak mau menjadikan profesi ini sebagai lahan untuk meniti karir dan mencari sumber nafkah. Tetapi, pengurus badan amil zakat provinsi Riau menjalankan profesinya sebagai amil zakat dengan sebaik-baiknya karena mereka tidak terlalu berharap bayaran dari pemerintah maupun dari harta zakat, mereka hanya menjalankan profesi ini sebagai lahan untuk mendapatkan amal ibadah dan pahala dari Allah SWT, sehingga membuat mereka tidak melalaikan pekerjaan dan terus untuk menjalankan tugas sebagai amil zakat.

Menurut hemat penulis dalam wawancara dengan bapak Auni M. Noor senin 31 mei 2010 tentang pengurus mampu untuk membedakan antara masalah pribadi dengan masalah organisasi, bahwa pengurus badan amil zakat mampu



untuk hal tersebut, karena pekerjaan yang diberikan kepada mereka selalu selesai sesuai dengan yang diperintahkan, para pengurus badan amil zakat menjalankan pekerjaannya dengan semaksimal, dan pekerjaan mereka tidak akan terpengaruh terhadap masalah pribadi yang mereka hadapi. Pengurus badan amil zakat akan menyelesaikan masalah mereka sesuai dengan tempat dan situasinya. Tidak ada permasalahan yang dicampuradukan oleh pengurus badan amil zakat dalam menyelesaikan tugasnya, sehingga tugas mereka sebagai amil zakat maupun sebagai makhluk sosial tidak ada yang terbengkalai. Pekerjaan apabila dicampuradukkan dengan masalah lain maka pekerjaan tersebut tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal dan pekerjaan tersebut tidak akan selesai tepat pada waktunya, untuk itulah pengurus perlu untuk membedakan antara masalah pribadi dengan masalah organisasi.

Pengurus bertanggung jawab dalam mengelola zakat produktif, berdasarkan wawancara dengan bapak Syamsul Sabtu 15 Mei 2010, penulis menganalisis bahwa pengurus badan amil zakat Provinsi Riau memiliki tanggung jawab yang sangat tinggi dalam menjalankan tugasnya. Pengurus badan amil zakat menjalankan tugasnya dengan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah, mereka selalu memberikan yang terbaik dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan berjalan dengan tidak sempurna. Pengurus amil zakat menanamkan dalam diri mereka rasa tanggung jawab yang sangat tinggi terhadap tugas yang diberikan, pengurus tidak pernah melalaikan tugas yang diberikan ataupun membiarkan pekerjaan tersebut terbengkalai, bahkan

program kerja yang direncanakan oleh para pengurus amal zakat dalam rapat kerja hampir seluruhnya berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Menurut hemat penulis berdasarkan wawancara dengan bapak syamsul 15 mei 2010 mengenai kode etik pengurus amal zakat, dalam pelaksanaan zakat pengurus badan amal zakat bekerja sesuai dengan kode etik yang berlaku. Pengurus amal zakat mempunyai job diskription dalam melaksanakan zakat, sehingga mereka selalu melaksanakan sesuai dengan job diskription yang telah ditetapkan. Pekerjaan yang dilakukan tidak berdasarkan kode etik tidak akan terlaksana sesuai dengan perencanaan, bahkan bisa membuat pekerjaan tersebut berantakan dan tidak berjalan dengan semestinya. Kode etik juga harus dimiliki oleh pengurus amal zakat, yang berguna bagi kedisiplinan para pengurus, serta sebagai peraturan yang harus ditaati oleh seluruh pengurus badan amal zakat, sehingga semua pengurus menjadi petugas amal yang selalu menjaga disiplin dan kualitas kerjanya.

Wawancara dengan bapak Auni M. Noor senin 31 mei 2010 tentang pengalaman yang dimiliki oleh pengurus badan amal zakat Provinsi Riau, menurut penulis pengurus badan amal zakat mempunyai pengalaman yang cukup dalam mengelola zakat produktif, tetapi tidak semua pengurus memiliki pengalaman yang cukup, karena sebagian pengurus baru saja menjadi anggota, sehingga mereka sangat minim dengan pengalaman dalam mengelola zakat produktif, tetapi pengurus yang berpengalaman memberikan wawasan dan pengalaman dalam mengelola zakat produktif kepada pengurus yang membutuhkan, sehingga semua pengurus memiliki pengetahuan yang sama. Pengalaman sangat dibutuhkan dalam

menjalankan suatu pekerjaan, karena dengan pengalaman pengurus akan mendapatkan pelajaran yang lebih banyak dari sebelumnya. Seseorang yang berpengalaman dengan orang yang hanya memiliki pendidikan tetapi minim pengalaman, maka akan lebih berhasil orang yang berpengalaman, karena dengan pengalaman memberikan pelajaran yang sangat berharga yang tidak didapatkan ketika menjalani pendidikan, untuk itulah pengalaman dibutuhkan dalam mengelola zakat produktif, agar pengelolaan zakat bisa berjalan dengan baik dan semua permasalahan akan dapat terselesaikan dengan mudah.

Dengan demikian berdasarkan hasil analisis data yang telah penulis analisis secara seksama bahwa profesionalisme pengurus badan amil zakat dalam mengelola zakat produktif yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Riau sudah cukup profesionalisme terhadap pelaksanaan zakat yang telah dilaksanakan, karena pengurus badan amil zakat sudah mampu untuk menyukseskan pengelolaan zakat produktif.

## **1.2 Faktor-Faktor Yang Menjadi Pendukung Dan Penghambat Profesionalisme Pengurus Badan Amil Zakat.**

Dalam menjalankan pengelolaan zakat pasti ada faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat dalam kelancaran pengelolaan zakat, adapun yang menjadi faktor pendukung keberhasilan dalam mengelola zakat produktif adalah:

- a. Adanya dukungan dan bantuan dari pemerintah.
- b. Adanya Undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat, sehingga pengurus memiliki kekuatan hukum dalam mengambil dan menyalurkan zakat.

- c. Memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman.
- d. Memiliki lokasi yang sangat strategis
- e. Mempunyai infrastruktur yang memadai dalam mengelola zakat produktif.
- f. Memiliki media atau website dalam menyampaikan informasi kepada muzakki dan mustahik.

Disamping yang menjadi faktor pendukung ada juga yang menjadi faktor penghambat dalam mengelola zakat produktif yaitu:

- a. Perekrutan pengurus yang kurang maksimal oleh kementrian agama.
- b. Masi kurangnya dana operasional untuk menjalankan zakat.
- c. Masi kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.
- d. Kurangnya bantuan dari segala pihak dalam menyukkseskan pengelolaan zakat.
- e. Pembentukan pengurus yang tidak maksimal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisa data yang telah penulis lakukan seperti yang dipaparkan pada Bab III dan bab IV adalah sebagai berikut:

- a. Profesionalisme pengurus badan amil zakat Provinsi Riau, penulis menganalisis berdasarkan data yang telah penulis dapatkan bahwa pengurus badan amil zakat sudah cukup profesional. Sedangkan berdasarkan teori serta konsep operasional yang telah penulis paparkan dalam Bab I dan Bab IV bahwa profesionalisme itu adalah mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi, dimana ciri-ciri seorang profesionalisme itu berdasarkan indikator-indikator dalam konsep opsional. Berdasarkan teori tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa pengurus badan amil zakat sudah cukup profesional dalam mengelola zakat produktif.
- b. Faktor pendukung dan penghambat Profesionalisme pengurus badan amil zakat. Adapaun yang menjadi faktor pendukung dari profesionalisme pengurus badan amil zakat adalah:
  1. Adanya dukungan dan bantuan dari pemerintah.
  2. Adanya Undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat, sehingga pengurus memiliki kekuatan hukum dalam mengambil dan menyalurkan zakat.
  3. Memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman.

4. Memiliki lokasi yang sangat strategis
5. Mempunyai infrastruktur yang memadai dalam mengelola zakat produktif.
6. Memiliki media atau website dalam menyampaikan informasi kepada muzakki dan mustahik.

Sedangkan faktor penghambat dari profesionalisme pengurus badan amil zakat adalah:

1. Perekrutan pengurus yang kurang maksimal oleh kementrian agama.
2. Masi kurangnya dana operasional untuk menjalankan zakat.
3. Masi kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.
4. Kurangnya bantuan dari segala pihak dalam menyukseskan pengelolaan zakat.
5. Pembentukan pengurus yang tidak maksimal.

## **1.2 Saran-Saran**

Adapun saran-saran yang penulis berikan kepada Badan Amil Zakat Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

- a. Kepada pengurus badan amil zakat Provinsi Riau hendaknya memiliki waktu yang lebih banyak kepada badan amil zakat, walaupun menjadi pengurus bukan prioritas utama, tetapi hendaknya selalu memberikan ide-ide serta pembaharuan dalam pelaksanaan zakat.
- b. Kepada pengurus badan amil zakat hendaknya memberikan masukan kepada kementrian agama dalam merekrut dan pembentukan pengurus badan amil zakat, supaya badan amil zakat memiliki pengurus yang benar-benar mampu

untuk melaksanakan pengelolaan zakat, karena pengurus sekarang yang lebih mengetahui orang-orang yang dibutuhkan untuk mengelola zakat.

- c. Kepada pengurus hendaknya bisa memberikan bantuan pemikiran kepada mustahik yang akan mendapatkan zakat produktif, supaya mereka benar-benar mampu untuk mengelola dana yang mereka dapatkan dari harta zakat.
- d. Kepada semua masyarakat muslim untuk bisa mempercayai zakatnya kepada pengurus badan amil zakat untuk dikelola dan diberdayakan. Sehingga zakat tersebut tersalur dan dimanfaatkan dengan baik.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul, Al-Hamid, Mahmud, Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, PT Raja Grafindo Persada, 2006, Jakarta.
- Abdurrahman, Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, PT Raja Grafindo Persada, 1998, Jakarta.
- Al-Qurthubi, *Al-Jami' li ahkam al-Qur'an*, Daar El-Kutub Ilmiah, 1993, Beirut Lebanon.
- Arief, Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat*, Kencana Prenada Media Group, 2008, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendakatan Praktik*, Rineka Cipta, 1997, Jakarta.
- Bartono, *Food Product Management*, Andi, 2005, Yogyakarta.
- Daud, Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia, 1998, Jakarta.
- David, Maister, *Profesionalisme Sejati*, PT Gramedia Pustaka Utama, 1998, Jakarta.
- Departemen Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999, Tentang Pengelolaan Zakat*, 1999, Jakarta.
- Didin, Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, 2002, Jakarta.
- Hadari, Nawawi, *Evaluasi dan manajemen Kinerja Di Lingkungan Perusahaan Dan Industri*, Gajah Mada University Press, 2006, Yogyakarta.
- Hasan, Ali, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, 2000, Jakarta.
- Indriyo, Gitosudarmo, *Pengantar Bisnis*, BPFE, 2003, Yogyakarta.
- Mamlatul, Maghfiroh, *Zakat*, PT. Pustaka Insan Madani, 2007, Yogyakarta.
- Muhammadiyah, Ja'far, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji*, Kalam Mulia, 1997, Jakarta.



- Nipan, Abdul, Halim, *Mengapa Zakat di Syari'atkan*, M2S, 2001, Bandung.
- Qodri, Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Pustaka Pelajar, 2004, Yogyakarta.
- Suyitno, *Anatomi Fiqh Zakat*, Pustaka Pelajar, 2005, Yogyakarta.
- Talizaduhu, Ndraha, *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, 2002, Jakarta.
- Tri, Rama, *Kamus Bahasa Indonesia*, Karya Agung, 2003, Surabaya.
- Wiwoho, *Kebangkitan Usaha Muslim*, PT. Bina Rena Parawira, 1991, Jakarta.

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Profesionalisme Pengurus Badan Amil Zakat

1. Bagaimana pengurus menerapkan ilmu atau pengetahuan dalam mengelola zakat produktif?
2. Bagaimana sikap yang dimiliki dalam mengelola zakat produktif?
3. Bagaimana pengurus mampu bekerja sama dengan orang lain dalam mengelola zakat produktif?
4. Bagaimana pengurus mempelajari profesinya?
5. Apakah pengurus mampu untuk bekerja keras dalam mengelola zakat produktif?
6. Apakah pengurus menguasai dengan baik dasar-dasar pekerjaannya?
7. Apakah pengurus menjadikan pekerjaan ini sebagai sumber nafkah?
8. Apakah pengurus mampu membedakan masalah pribadi dengan organisasi?
9. Bagaimana tanggung jawab pengurus dalam mengelola zakat produktif?
10. Apakah pengurus melaksanakan tugas berdasarkan kode etik yang berlaku?
11. Apakah pengurus memiliki pengalaman dalam mengelola zakat produktif?

### B. Faktor yang mendukung dan menghambat

1. Bagaimana proses rekrutmen pengurus badan amil zakat?
2. Bagaimana pendidikan yang harus dimiliki oleh seorang pengurus badan amil zakat?
3. Bagaimana lingkungan kerja yang didapatkan oleh pengurus badan amil zakat?
4. Bagaimana Ketrampilan atau kemampuan pengurus dalam menjalankan tugasnya?
5. Bagaimana pemberian motivasi kepada pengurus badan amil zakat?
6. Bagaimana disiplin para pengurus badan amil zakat?
7. Bagaimana sikap ketua badan amil zakat dalam memperlakukan bawahannya?